RENCANA KERJA

2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan Hidayah-Nya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renja Bakesbangpol) Kota Bandung Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Dokumen Renja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 guna memberikan gambaran rencana pembangunan di Kota Bandung lingkup urusan pemerintahan umum, bidang kesatuan bangsa dan politik untuk tahun 2024, setelah *mereview* kembali capaian kinerja tahun sebelumnya, dan akan dijadikan panduan dan pedoman dalam rencana pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik Kota Bandung pada tahun 2024.

Renja Bakesbangpol Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2024 dan berpedoman kepada Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan tanggal 30 Maret 2023.

Akhirnya kami berharap agar Renja Bakesbangpol Kota Bandung 2024 ini lebih baik dan dapat menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026.

Demikian untuk menjadi bahan selanjutnya, dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDUNG,

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Drs. H. BAMBANG SUKARDI, M. Si.
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 19671005 198903 1 008

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 5

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 9

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 10

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 1

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 1

2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN 16

2.3 ISU-ISU PENTING PENTING PENYELENGGARAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 17

2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 18

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAKESBANGPOL 1

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 1

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 1

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 2

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1

BAB V PENUTUP 1

5.1 CATATAN PENTING 1

5.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN 1

5.3 RENCANA TINDAK LANJUT 2

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDUNG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota I-2

Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran I-4

Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antar Dokumen I-5

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Bandung.....II-2

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakesbangpol Kota Bandung II-16

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kota Bandung II-20

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bakesbangpol Kota Bandung....III-2

Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Bandung..... III-4

Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 Kota Bandung.....IV-1

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDUNG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berorientasi pada hasil *(result oriented government)* bermakna pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dituntut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Sehubungan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; maka Bakesbangpol Kota Bandung menyusun Dokumen Renja 2024 yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya Renja ini, diharapkan pelayanan Bakesbangpol Kota Bandung dapat berperan secara optimal.

1.1.1. Pengertian Renja

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan UU nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; telah mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Renja SKPD sebagai pedoman kerja operasional selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD.

Bakesbangpol Kota Bandung adalah SKPD di Kota Bandung yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja

SKPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Rancangan Renja SKPD mengacu pada rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Renja SKPD dilakukan dengan pengesahan Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan. Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja SKPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja SKPD yang mengacu Perkada RKPD;
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan;
3. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur kinerja, target capaian program/ kegiatan / sub kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan;
4. Renja SKPD adalah dokumen resmi program dan kegiatan SKPD yang akan diaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA SKPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

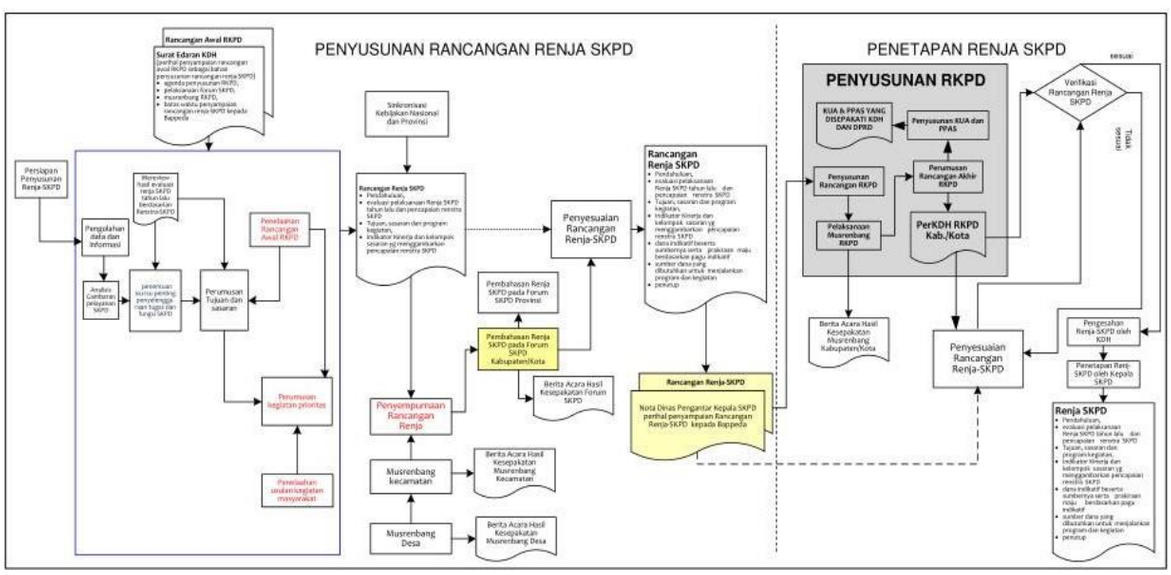

Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota

Adapun tahapan persiapan penyusunan renja Perangkat Daerah tertuang dalam Pasal 125 s.d. Pasal 143 Permendagri No.86 Tahun 2017 dengan tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepda tentang pembentukan tim penyusun Renja; orientasi mengenai Renja; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah; berpedoman pada Renstra, berdasarkan evaluasi hasil Renja tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja tahun berjalan. Hasil perumusan rancangan awal Renja, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
   - pendahuluan;
   - hasil evaluasi Renja tahun lalu;
   - tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
   - rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
   - penutup.
c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah; merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja. Kemudian disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan, bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja. Hasil pembahasan kemudian dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
f. Penetapan Renja Perangkat Daerah; Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:

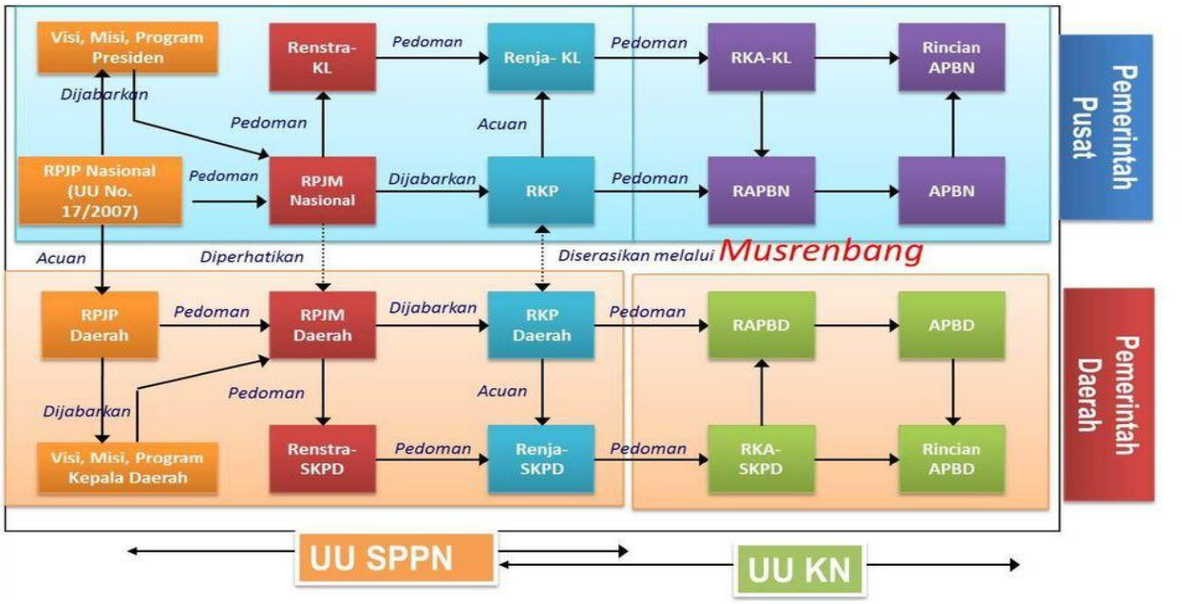

Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Renja sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan proses yang sistematis dan terpadu, maka tahapan dan dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

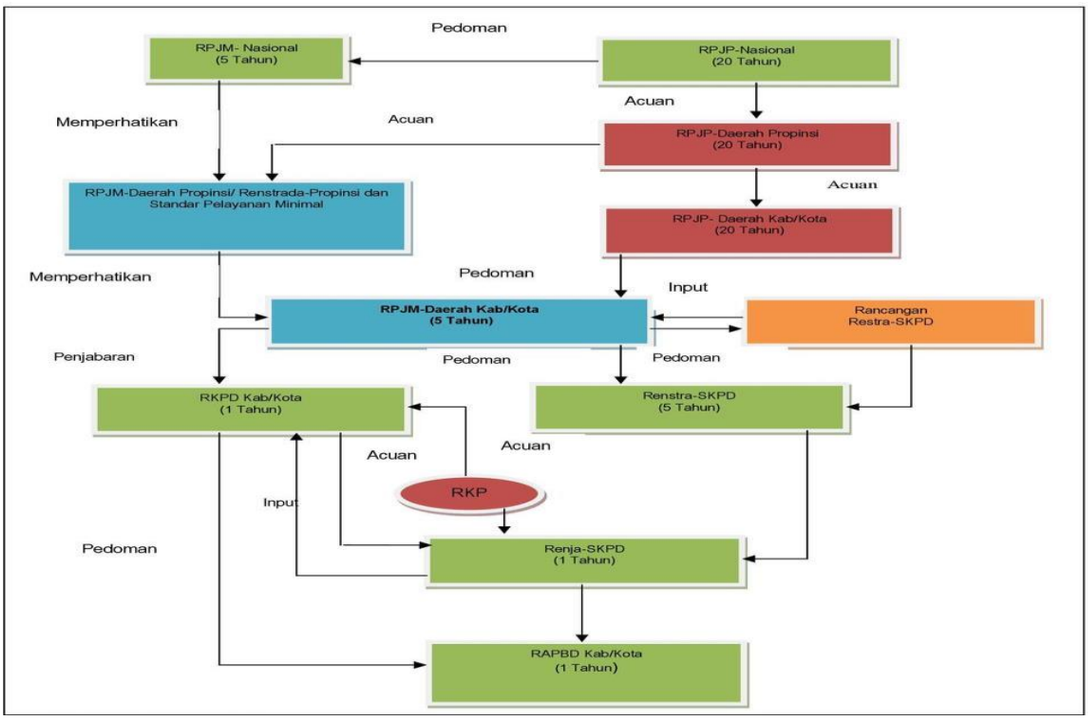

Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antar Dokumen

1.2 LANDASAN HUKUM

Beberapa aturan dan pedoman yang dijadikan acuan dalam rangka perencanaan dan penganggaran serta penyusunan Renja antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan yang terdapat pada, dapat dirinci sebagai berikut:

1.2.1 Aturan umum terkait Penyusunan RENJA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, tentang Hibah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

1.2.2 *Aturan yang terkait dengan Tugas Pokok Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :*

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant On Economic, Social and Cultural Rights Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant On Civil and Politic Right (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dicabut sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
   Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 dan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dicabut sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 126 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
10. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967, tentang Penetapan Tanggal 1 Oktober sebagai Peringatan Hari Kesaktian Pancasila;
11. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006, tentang Hari Bela Negara;
12. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
13. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
14. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Kraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010, tentang Pemantauan Tenaga Kerja Asing;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011, tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.11 Tahun 2006, tentang Komunitas Intelejen Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011, tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014, tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;

31. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009; Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
32. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Mendagri Nomor : 3 Tahun 2008, Nomor : KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor : 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 – 440 Tahun 2019 Tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
35. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
36. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
37. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Bakesbangpol adalah untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan Bakesbangpol selama periode satu tahun yaitu tahun 2024 sehingga secara konsekuen dan konsisten dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Bakesbangpol Kota Bandung yang mengacu pada RKPD Kota Bandung Tahun 2024 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026.

1.3.2 Maksud

Maksud penyusunan Renja Bakesbangpol Kota Bandung antara lain:

1. Merumuskan dan menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun kedepan sesuai tugas dan fungsi Bakesbangpol yaitu tahun 2024;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan tahun 2024;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan selama satu tahun kedepan yaitu tahun 2024;
4. Sebagai bahan dan tolak ukur dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota tahun 2024 terutama dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen Renja Bakesbangpol Kota Bandung 2024 disusun, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Bab ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renja, fungsi Renja dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan Renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol Kota Bandung tahun lalu (tahun n-2) yaitu tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yaitu tahun 2023, mengacu pada APBD tahun berjalan yaitu tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra, berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Bakesbangpol tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu yaitu tahun 2022, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bakesbangpol Kota Bandung.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat Catatan Penting, Kaidah Pelaksanaan, dan Rencana Tindak Lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi ini memuat kajian *(review)* terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol Kota Bandung tahun lalu (n-2) yaitu tahun 2022 dan perkiraan tahun berjalan (n-1) yaitu tahun 2023 mengacu pada APBD Tahun sedang berjalan, yaitu tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bakesbangpol berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Bakesbangpol tahun-tahun sebelumnya.

Adapun evaluasi pelaksanaan kinerja Bakesbangpol dapat dilihat pada Tabel 2.1. tentang Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bakesbangpol dan Pencapaian Renstra Bakesbangpol sampai dengan Tahun 2023. Evaluasi ini diperlukan guna melihat efektivitas program/kegiatan/sub kegiatan, kebutuhan anggaran yang telah dipergunakan dan melihat beberapa realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang sudah memenuhi target, belum memenuhi, atau bahkan melewati target, faktor-faktor penyebab atau yang mempengaruhi terlaksananya suatu program/kegiatan/sub kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target kinerja dan akhirnya kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi beberapa faktor penyebab tersebut.

Nomenklatur program/ kegiatan/sub kegiatan sesuai Permendagri Nomor 9O Tahun 2019 c.q. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021. Untuk rincinya bisa dilihat di tabel berikut :

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Bandung

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Ideologi**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan**	**10 kegiatan**	**100 Kegiatan**	**4 kegiatan**	**4 kegiatan**	**100 %**	**8 kegiatan**	**112 kegiatan**	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 orang	1 orang	1000 orang	1000 orang	**100 %**	100 orang	1101 orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	7 orang	7 orang	200 orang	200 orang	**100 %**	50 orang	257 orang	
8.01.02.2.01.06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	- -	-	-	-	**-**	100 keluarga	100 keluarga	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Politik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Pembinaan Politik	100 kegiatan	100 Kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100 %	13 kegiatan	117 kegiatan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9 orang	12 orang	500 orang	500 orang	**100 %**	100 orang 0	1512 orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	24 orang	12 orang	200 orang	200 orang	**100 %**	200 orang	412 orang	
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Sosial Kemasyarakatan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan**	**Jumlah pembinaan ormas**	**100 kegiatan**	**100 kegiatan**	**4 kegiatan**	**4 kegiatan**	**100 %**	**25 kegiatan**	**129 kegiatan**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Organisasi Kemasyarakatan									
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	62 orang	14 orang	500 orang	500 orang	**100 %**	500 orang	1014 kegiatan	
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial**	**Jumlah koordinasi dan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya**	**100 kegiatan**	**100 kegiatan**	**7 kegiatan**	**7 kegiatan**	**100 %**	**6 kegiatan**	**113 kegiatan**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	dan Budaya									
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	22 Orang	4 orang	500 orang	475 orang	**95 %**	500 orang	979 orang	
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Kewaspadaan Nasional**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Jumlah kerjasama intelijen dan koordinasi kewaspadaan nasional**	**100 kegiatan**	**100 kegiatan**	**4 kegiatan**	**4 kegiatan**	**100 %**	**8 kegiatan**	**112 kegiatan**	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	70 orang	33 orang	500 orang	475 orang	**95 %**	250 orang	758 orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	9 orang	2 orang	200 orang	150 orang	**75 %**	50 orang	202 orang	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	**100 %**	1 dokumen	5 dokumen	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		-	-	-	-	**100 %**	**100 %**	
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Sekretariat)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Keuangan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 pegawai	50 pegawai	47 orang	47 orang	**100 %**	47 orang/bulan	144 orang/bulan	
8.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Admnistrasi Kepegawaian**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 stel	55 stel	47 stel	50 stel	**106 %**	50 paket	155 stel	
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	**100 %**	1 paket	3 paket	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	**100 %**	1 paket	3 paket	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	1000 paket	525 paket	**53 %**	1 paket	538 paket	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	1 paket	0	**0 %**	1 paket	13 paket	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	5 dokumen	7 dokumen	**140 %**	10 dokumen	29 dokumen	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	5 laporan	6 laporan	**120 %**	1 laporan	8 laporan	
8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	**100 %**	10 unit	12 unit	
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	0	1 paket	1 paket	**100 %**	12 unit	13 unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa penunjang**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	**100 %**	12 laporan	36 laporan bulanan	
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	0	1 laporan	1 laporan	**100 %**	1 laporan	2 laporan	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 laporan	7 laporan	12 laporan	12 laporan	**100 %**	12 laporan	31 laporan	
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pemeliharaan Barang Milik Daearah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	46 unit	46 unit	**100 %**	41 unit	88 unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	12 unit	50 unit	50 unit	**100 %**	100 unit	162 unit	
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	**100 %**	1 unit	3 unit	

Pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun 2022) dan Renja tahun berjalan (tahun 2023) dapat dilihat dalam tabel diatas, sekaligus review terhadap Perubahan Renstra Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2018-2023. Alhamdulillaah, pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan: mulai tahun 2022, pengalihan kegiatan Paskibra ke Bakesbangpol membuat Bakesbangpol lebih bersemangat.
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik: menjelang tahun 2024, menyambut Pesta Demokrasi sehingga dilakukan koordinasi dengan mitra Partai Politik untuk menjaga kondusifitas lingkungan.
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan: koordinasi dengan Organisasi Masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar supaya kondusif.
4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial: adanya audiensi yang dilakukan untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat.

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan: pelaksanaan sub kegiatan mengalami penundaan akibat pandemi.
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik: pelaksanaan sub kegiatan mengalami penundaan akibat pandemi
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan: bertambahnya Organisasi Masyarakat di Kota Bandung membuat sosialisasi orientasi tujuan pembangunan Kota Bandung semakin bertambah.
4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial: adanya kegiatan unjuk rasa di lingkungan Kota Bandung.

Perlu dimaklumi bahwa terhadap rencana jangka menegah baru yakni Renstra Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2024-2026 c.q. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026 belum dilaksanakan review.

2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN

Dalam bagian ini menyajikan analisa capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sasaran/target Renstra, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta dikaitkan juga dengan peraturan perundang-undangan tentang kinerja pelayanan. Bakesbangpol telah menyusun indikator kinerja pelayanan sesuai tupoksinya yang dituangkan pada Perubahan Renstra Bakesbangpol Tahun 2018-2023 adalah :

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik	—	—	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	—	—	83,00	83,25	83,50	87,00	87,25	84,5	87,47	87,89	90,13	99,59	

Catatan: Realisasi tahun 2023 adalah s.d. triwulan II

Untuk indikator *Tujuan* Terjaganya Kondusifitas Kota Bandung pada *Sasaran* Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya diukur dengan Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik, yang dihitung berdasarkan jumlah kejadian yang ditangani berbanding dengan jumlah kejadian berpotensi konflik kali 100%. Target harus 100% menunjukan tidak boleh ada satupun konflik di Kota Bandung, dan syukurlah sampai dengan tahun 2022 dan triwulan II tahun 2023 target 100% bisa dicapai.

Selain indikator diatas Kesbangpol memiliki *Tujuan* Meningkatkan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa & Politik dengan *Sasaran* Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Untuk mengukurnya memakai cara kuisioner kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan berupa surat ijin penelitian/kerja praktek/survey. Untuk tahun 2021 target 83,50 bisa dicapai di 87,89 dan untuk tahun 2022 dari target 87,00 tercapai 90,13; serta target tahun 2023 sebesar 87,25 dengan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023 mencapai 99.59.

Untuk pencapaian indikator “persentase konflik tidak menjadi konflik” faktor pendukungnya adalah koordinasi yang baik dengan jajaran samping/instansi vertikal; mengoptimalkan koordinasi dengan forum-forum mitra strategis Bakesbangpol (Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat); dan memfasilitasi permintaan ijin menyampaikan pendapat di muka umum diarahkan untuk audiensi perwakilan dengan instansi terkait & instansi vertikal.

Adapun faktor penghambatnya adalah kewenangan atas urusan pemerintahan umum di daerah belum optimal.

Sedangkan untuk pencapaian indikator "indeks kepuasan masyarakat" faktor pendukungnya adalah transparansi aturan dan biaya yang nol rupiah, proses lebih cepat melalui media *online* maupun datang langsung. Adapun faktor penghambatnya adalah kapasitas ruang tunggu kurang memadai dan otorisasi surat rekomendasi masih bersifat manual belum elektronik.

2.3 ISU-ISU PENTING PENTING PENYELENGGARAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bakesbangpol Kota Bandung berkaitan dengan kondisi sosial politik, budaya, ekonomi, agama, dan juga situasi keamanan yang terus mengalami dinamika. memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Kota Bandung dapat dikemukan beberapa isu penting yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung sebagai berikut :

1. Isu Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
   a. Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila

      Pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila yang masih rendah sehingga menimbulkan terjadinya konflik sosial di masyarakat. Pemahaman Pancasila itu sangat penting karena merupakan dasar negara yang dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.

      Supaya terjaganya Pemilu yang adil maka dalam penyelenggaraan Pemilu tidak diperkenankan untuk melaksanakan tugas kepemiluan secara partisipan dengan memberikan keuntungan bagi kelompok atau peserta Pemilu tertentu, melakukan malapraktik dan fraud (kecurangan Pemilu), serta maladministrasi (kesalahan administrasi Pemilu). Adapun dari sisi pemilih, mereka tidak diperbolehkan untuk menjual suaranya kepada para peserta Pemilu, sebaliknya, dalam menggunakan hak suaranya harus secara cerdas.[1]

2. Isu Politik Dalam Negeri
   a. Situasi Politik Kota

      Potensi terjadinya politik identitas. Tanggungjawab pemerintah, peran partai politik ikut berperan supaya politik identitas ini tidak menjadi isu yang mengkhawatirkan saat gelaran pesta politik di Kota Bandung.

[1] https://kab-temanggung.kpu.go.id/berita/baca/7780/menyingkap-nilai-nilai-luhur-pancasila-dalam-pemilu

b. Fasilitasi Partai Politik

Parpol tidak hanya berperan dalam mempersiapkan para kader calon pemimpin, namun juga memperjuangkan kebijakan publik untuk kepentingan masyarakat. Persoalan Transparansi atas pendanaan Parpol masih menjadi tantangan hingga saat ini.

c. Pemahaman Politik

Pemahaman politik yang rendah dan tidak merata di masyarakat mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap politik dilingkungan sekitar.

3. Isu Ketahanan Ekonomi Dan Sosial Budaya

a. Toleransi

Sikap intoleransi antar umat beragama misalnya dalam hal pendirian rumah ibadah bagi pemeluk agama minoritas, pelaksanaan ritual ibadah yang berbeda diantara internal umat beragama, dan sebagainya.

4. Isu Kewaspadaan Nasional

a. Potensi Konflik Sosial

Tingginya hoax pada media sosial menjelang pemilu tahun 2024, dapat menimbulkan potensi konflik sosial. Direktorat Pengkajian Pertahanan Keamanan dan Geografi Lemhannas RI telah melakukan pengumpulan data kajian, dalam hal ini terdapat 171 kepala daerah, yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota, yang akan berakhir masa jabatannya. Menurut Gubernur Lemhannas RI, Potensi terjadinya kerusuhan pada Pemilu 2024, penting untuk diantisipasi sejak dini. Apabila karena sesuatu hal, konflik sampai terjadi di sebagian besar daerah, tentu akan sangat sulit ditangani oleh aparat keamanan dan akan dapat berpengaruh langsung terhadap kondisi kamtibmas dan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2024.[2]

2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD Kota Bandung tahun 2024 merupakan langkah awal bagi SKPD dalam penyusunan rancangan awal Renja tahun 2024 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahun 2024. Program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD sehingga menghasilkan program prioritas pembangunan.

[2] https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1617-potensi-konflik-pada-pemilu-2024-penting-untuk-diantisipasi-sejak-dini

Pada tahun 2024 program/kegiatan/sub kegiatan Bakesbangpol mengikuti nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 c.q. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021. Rancangan awal Renja tahun 2024 akan di sinkronisasi dengan rancangan awal RKPD sehingga menjadi rumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang definitif untuk dijadikan rencana kerja tahun 2024. Berikut ini adalah tabel review terhadap rancangan awal RKPD Kota Bandung Tahun 2024.

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kota Bandung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Capaian Target**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Capaian Target**	**Kebutuhan Dana**		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				24.201.795.620	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				20.266.183.940		-3.935.611.680
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				9.992.176.720	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				10.994.702.780		1.002.526.060
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan penunjang urusan pemerintahan	100%	9.992.176.720	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	10.994.702.780		1.002.526.060
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi keuangan	100%	9.883.576.720	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi keuangan	100 %	10.539.731.280		656.154.560
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	9.883.576.720	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	10.539.731.280		656.154.560
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				108.600.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan administrasi keuangan	100 %	454.971.500		346.371.500
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	108.600.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	64 Paket	91.101.500		-17.498.500
3						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	363.870.000	Kegiatan Pembinaan Pegawai	363.870.000
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						-
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				3.987.419.600	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,6	4.466.944.160		479.524.560

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Capaian Target**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Capaian Target**	**Kebutuhan Dana**		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan penunjang urusan pemerintaha	100%	3.987.419.600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	4.466.944.160		479.524.560
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan perencanaan, penganggaran & evaluasi	100%	100.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan perencanaan, penganggaran & evaluasi	100 %	97.310.000		-2.690.000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	100.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	97.310.000		-2.690.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				876.514.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan administrasi umum	100 %	915.828.960		39.314.960
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	43.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	43.878.494		878.494
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	51.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	23.624.466		-27.375.534
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	234.494.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	248.360.000		13.866.000
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	154.920.000		109.920.000
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokume	402.300.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	14.231.000		-388.069.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Kelurahan					Kelurahan					
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100.720.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	430.815.000		330.095.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pengadaan barang milik daerah	100%	402.750.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pengadaan barang milik daerah	100 %	78.488.700		- 324.261.300
5	Pengadaan Mebel	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	50.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				- 50.000.000
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	352.750.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	78.488.700		- 274.261.300
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang	100%	1.244.130.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.976.711.000		732.580.200
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	682.570.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	256.608.000		- 425.962.800
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	54.500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	39.336.000		- 15.164.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Capaian Target**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Capaian Target**	**Kebutuhan Dana**		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	
		n					n					
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	507.060.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.680.767.000		1.173.707.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	100%	1.364.024.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	1.398.605.500		34.580.700
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	41 Unit	1.086.024.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit	1.067.096.500		-18.928.300
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	80.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	94 Unit	62.860.000		-17.140.000
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	198.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	268.649.000		70.649.000
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						-
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				3.242.000.000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				1.331.769.000		-1.910.231.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Capaian Target**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Capaian Target**	**Kebutuhan Dana**		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup ideologi	100%	3.242.000.000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran	Sangat Baik (≥4,21)Nilai	1.331.769.000	Terdapat perubahan pada Indikator Program	-1.910.231.000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan	8 Kegiatan	3.242.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan	8 Kegiatan	1.331.769.000		-1.910.231.000
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	2.982.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang	1.251.862.860		-1.730.137.140
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	60.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250 Orang	7.990.614		-52.009.386

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Capaian Target**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Capaian Target**	**Kebutuhan Dana**		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	
6	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100 Keluar	200.000.000	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100 Keluarga	71.915.526		-128.084.474
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						-
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				2.932.199.300	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				1.480.000.000		-1.452.199.300
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup politik	100%	2.932.199.300	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran	Sangat Baik (≥4,21)Nilai	1.480.000.000	Terdapat perubahan pada Indikator Program	-1.452.199.300
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan		Jumlah pembinaan politik	13 Kegiatan	2.932.199.300	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan		Jumlah pembinaan politik	13 Kegiatan	1.480.000.000		-1.452.199.300

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Capaian Target**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Capaian Target**	**Kebutuhan Dana**		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	
	Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1000 Orang	2.930.999.300	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1000 Orang	982.529.600		-1.948.469.700
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	200 Orang	1.200.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	1000 Orang	497.470.400		496.270.400

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Capaian Target**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Capaian Target**	**Kebutuhan Dana**		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	
			Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						-
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				2.067.000.000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				1.157.000.000		-910.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup kewaspadaan nasional	100 %	2.067.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Indeks Kebebasan dari Diskriminasi	Sangat Baik (≥4,21)Nilai	1.157.000.000	Terdapat perubahan pada Indikator Program	-910.000.000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah kerjasama intelijen dan koordinasi kewaspadaan nasinal	8 Kegiatan	2.067.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah kerjasama intelijen dan koordinasi kewaspadaan nasinal	8 Kegiatan	1.157.000.000		-910.000.000
						Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	1 Dokumen	100.000.000		100.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Capaian Target**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Capaian Target**	**Kebutuhan Dana**		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	
								Konflik di Daerah yang Disusun				
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	250 Orang	603.376.800	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500 Orang	336.650.000		-266.726.800
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	Semua Kab/Kota, Semua	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi	50 Orang	1.271.623.200	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	Semua Kab/Kota, Semua	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang	400 Orang	424.025.000		-847.598.200

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Capaian Target**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Capaian Target**	**Kebutuhan Dana**		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	
	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kecamatan, Semua Kelurahan	di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kecamatan, Semua Kelurahan	Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokume	192.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	296.325.000		104.325.000
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						-
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				1.981.000.000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				835.768.000		- 1.145.232.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup sosial kemasyarakatan	100%	751.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran	Sangat Baik (≥4,21)Nilai	287.050.000	Terdapat perubahan pada Indikator Program	- 463.950.000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah pembinaan ormas	25 Kegiata	751.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah pembinaan ormas	5 Kegiatan	287.050.000		- 463.950.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Capaian Target**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Capaian Target**	**Kebutuhan Dana**		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500 Orang	751.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1000 Orang	287.050.000		-463.950.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase konflik tidak menjadi konflik lingkup ekonomi, sosial dan budaya	100%	1.230.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Indeks Kebebasan Berkeyakinan	Sangat Baik (≥4,21)Nilai	548.718.000	Terdapat perubahan pada Indikator Program	-681.282.000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah koordinasi dan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	6 Kegiatan	1.230.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah koordinasi dan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	6 Kegiatan	548.718.000		-681.282.000
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	500 Orang	1.230.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1000 Orang	548.718.000		-681.282.000
					24.201.795.620					20.266.183.940		-3.935.611.680

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAKESBANGPOL

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Penetapan kebijakan penyelenggaran program/kegiatan/sub kegiatan Bakesbangpol Kota Bandung juga merujuk pada Kebijakan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai Tujuan dan Sasaran sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, yaitu:

Adapun Tujuan Strategis adalah "Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa" dengan Sasaran Strategis yaitu:

1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dengan indikator yaitu Indeks Demokrasi Indonesia; Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu; dan Indeks Kinerja Ormas.
2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan indikator yaitu Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi; Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM); Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi; Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
3. Meningkatnya kewaspadaan nasional, dengan indikator yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.

Selain menelaah Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri maka di level provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat ditelaah juga Renja Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dengan Tujuannya yaitu "Meningkatnya kualitas demokrasi" dengan Sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, dengan indikator yaitu Persentase kasus perselisihan antar umat beragama yang diselesaikan.
2. Meningkatnya kohesivitas sosial, dengan indikator yaitu Persentase ormas dan orpol yang berdaya.
3. Meningkatnya Kondusifitas daerah, dengan indikator yaitu Angka konflik sosial.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 atau 5 tahun. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran Bakesbangpol Kota Bandung mengacu pada Rencana Strategis Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2024-2026 setelah menelaah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026. Oleh karena RPD ≥dimaksud tidak memiliki Visi dan Misi karena disusun secara teknokratik, tidak politik, karena belum ada kepala daerah yang terpilih maka hanya Tujuan dan Sasaran saja yang dimuat.

Berdasarkan Renstra Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2024-2026 maka Tujuan dan Sasaran Bakesbangpol Kota Bandung adalah sbb:

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bakesbangpol Kota Bandung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2024
Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ketentraman dan Sosial	Meningkatnya Kualitas Kesatuan Bangsa dan Demokrasi	Indeks Perlindungan Kebhinekaan (IPK)	Sangat Baik (≥4,21)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Masyarakat Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,55

Tujuan pertama Bakesbangpol Kota Bandung adalah “Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ketentraman dan Sosial” dengan Sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesatuan Bangsa dan Demokrasi” dengan Indikator “Indeks Perlindungan Kebhinekaan (IPK)” dengan target 2024 adalah Sangat Baik (≥4,21)

Tujuan keduanya untuk mengukur pelayanan kepada masyarakat adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik” dengan Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Masyarakat Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik” dengan Indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” dengan target 2024 sebesar 89,55 poin.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan keselarasan perencanaan pembangunan di Ditjen Polpum Kemendagri dan perencanaan di daerah baik RPD maupun Renstra serta peraturan terkini diantaranya Permendagri Nomor 9O Tahun 2019 c.q. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 maka Bakesbangpol Kota Bandung merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan untuk tahun 2024 dengan rekapitulasi yaitu:

Jumlah Program : 6 (enam) buah
Jumlah Kegiatan : 12 (dua belas) buah
Jumlah Sub Kegiatan : 29 (dua puluh sembilan) buah

Pagu Indikatif APBD : Rp.20.266.183.940,- (dua puluh miliar dua ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

Tabel rencana program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2024 dan perkiraan tahun 2024 dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Bandung

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				20.266.183.940	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.493.128.307
					15.461.646.940				16.642.874.407
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**100 %**	**10.994.702.780**			**100 %**	**11.342.867.981**
I	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Cakupan layanan administrasi keuangan*		*100 %*	*10.539.731.280*			*100 %*	*10.889.077.381*
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42 Orang/bulan	10.539.731.280			42 Orang/bulan	10.889.077.381
II	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Cakupan administrasi keuangan*		*100 %*	*454.971.500*			*100 %*	*453.790.600*
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64 Paket	91.101.500			50 Paket	89.920.600
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		65 Orang	363.870.000			65 Orang	363.870.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	4.466.944.160			100 %	5.300.006.426
III	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Cakupan perencanaan, penganggaran & evaluasi*		*100 %*	*97.310.000*			*100 %*	*114.521.000*
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	97.310.000			1 Laporan	114.521.000
IV	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	Cakupan administrasi umum		100 %	915.828.960			100 %	992.760.846
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	43.878.494			1 Paket	52.538.090
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	23.624.466			1 Paket	30.890.156

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	248.360.000			1 Paket	213.824.600
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	154.920.000			1 Paket	237.017.000
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	14.231.000			10 Dokumen	15.654.100
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	430.815.000			1 Laporan	442.836.900
V	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Cakupan Pengadaan barang milik daerah*		*100 %*	*78.488.700*			*100 %*	*90.158.530*
5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					10 Unit	
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Unit	78.488.700			12 Unit	90.158.530
VI	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Cakupan penyediaan jasa penunjang*		*100 %*	*1.976.711.000*			*100 %*	*2.584.214.600*
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	256.608.000			12 Laporan	711.510.800
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	39.336.000			1 Laporan	43.269.600
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	1.680.767.000			12 Laporan	1.829.434.200
VII	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Cakupan pemeliharaan barang milik daerah*		*100 %*	*1.398.605.500*			*100 %*	*1.518.351.450*
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Unit	1.067.096.500			41 Unit	1.173.806.150

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Unit	62.860.000			100 Unit	69.740.000
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	268.649.000			1 Unit	274.805.300
B	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran**		**Sangat Baik (≥4,21)Nilai**	**1.331.769.000**			**100 %**	**1.464.945.900**
VIII	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*	*Jumlah pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan*		*8 Kegiatan*	*1.331.769.000*			*8 Kegiatan*	*1.464.945.900*
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Orang	1.251.862.860			100 Orang	1.377.049.146
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 Orang	7.990.614			50 Orang	8.789.675
6	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Keluarga	71.915.526			100 Keluarga	79.107.079
C	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran**		**Sangat Baik (≥4,21)Nilai**	**1.480.000.000**			**100 %**	**1.724.460.000**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
IX	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik*	*Jumlah pembinaan politik*		*13 Kegiatan*	*1.480.000.000*			*13 Kegiatan*	*1.724.460.000*
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Orang	982.529.600			1000 Orang	1.000.000.000
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Orang	497.470.400			200 Orang	724.460.000
D	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Indeks Kebebasan dari Diskriminasi**		**Sangat Baik (≥4,21)Nilai**	**1.157.000.000**			**100 %**	**1.851.798.000**
X	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*	*Jumlah kerjasama intelijen dan koordinasi kewaspadaan nasinal*		*8 Kegiatan*	*1.157.000.000*			*8 Kegiatan*	*1.851.798.000*

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		1 Dokumen	100.000.000			1 Dokumen	110.000.000
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Orang	336.650.000			500 Orang	800.000.000
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 Orang	424.025.000			400 Orang	850.163.600
6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	296.325.000			1 Dokumen	91.634.400
E	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran**		**Sangat Baik (≥4,21)Nilai**	**287.050.000**			**100 %**	**262.900.000**
XI	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*	*Jumlah pembinaan ormas*		*5 Kegiatan*	*287.050.000*			*25 Kegiatan*	*262.900.000*

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Orang	287.050.000			1000 Orang	262.900.000
F	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Indeks Kebebasan Berkeyakinan**		**Sangat Baik (≥4,21)Nilai**	**548.718.000**			**100 %**	**546.150.000**
XII	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*	*Jumlah koordinasi dan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya*		*6 Kegiatan*	*548.718.000*			*6 Kegiatan*	*546.150.000*
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Orang	548.718.000			1000 Orang	546.150.000
	J U M L A H				20.266.183.940				22.493.128.307

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rencana kerja adalah suatu proses yang tidak pernah berakhir, apabila rencana telah ditetapkan, maka dokumen mengenai perencanaan yang terkait harus diimplementasikan. Karena perencanaan atau rencana kerja adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa (Husein Umar, 2009).

Rencana Kerja digunakan dalam manajemen sebagai pedoman pengarahan program/kegiatan/sub kegiatam dan juga sebagai titik tolak proses pengendalian dan evaluasi yang disusun pada setiap periode. Pada bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 Kota Bandung

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			**20.266.183.940**
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**10.994.702.780**
I	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Cakupan layanan administrasi keuangan*	*100 %*	*10.539.731.280*
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	10.539.731.280
II	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Cakupan administrasi keuangan*	*100 %*	*454.971.500*
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	64 Paket	91.101.500
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	363.870.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	4.466.944.160
III	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Cakupan perencanaan, penganggaran & evaluasi*	*100 %*	*97.310.000*
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	97.310.000
IV	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	Cakupan administrasi umum	100 %	915.828.960
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	43.878.494
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	23.624.466
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	248.360.000
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	154.920.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	14.231.000
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	430.815.000
V	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Cakupan Pengadaan barang milik daerah*	*100 %*	*78.488.700*
5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	78.488.700
VI	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Cakupan penyediaan jasa penunjang*	*100 %*	*1.976.711.000*
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	256.608.000
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	39.336.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.680.767.000
VII	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Cakupan pemeliharaan barang milik daerah*	*100 %*	*1.398.605.500*
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit	1.067.096.500
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	94 Unit	62.860.000
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	268.649.000
B	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran**	**Sangat Baik (≥4,21)Nilai**	**1.331.769.000**
VIII	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*	*Jumlah pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan*	*8 Kegiatan*	*1.331.769.000*
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang	1.251.862.860
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250 Orang	7.990.614
6	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100 Keluarga	71.915.526

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
C	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran**	**Sangat Baik (≥4,21)Nilai**	**1.480.000.000**
IX	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik*	*Jumlah pembinaan politik*	*13 Kegiatan*	*1.480.000.000*
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1000 Orang	982.529.600
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1000 Orang	497.470.400
D	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Indeks Kebebasan dari Diskriminasi**	**Sangat Baik (≥4,21)Nilai**	**1.157.000.000**
X	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*	*Jumlah kerjasama intelijen dan koordinasi kewaspadaan nasinal*	*8 Kegiatan*	*1.157.000.000*
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500 Orang	336.650.000
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400 Orang	424.025.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	296.325.000
E	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran**	**Sangat Baik (≥4,21)Nilai**	**287.050.000**
XI	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*	*Jumlah pembinaan ormas*	*5 Kegiatan*	*287.050.000*
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1000 Orang	287.050.000
F	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Indeks Kebebasan Berkeyakinan**	**Sangat Baik (≥4,21)Nilai**	**548.718.000**
XII	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*	*Jumlah koordinasi dan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya*	*6 Kegiatan*	*548.718.000*
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1000 Orang	548.718.000
				20.266.183.940

BAB V
PENUTUP

5.1 CATATAN PENTING

Program/kegiatan/sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seluruhnya bersifat non fisik; lebih kearah fasilitasi dan pembinaan, sehingga tidak terasa langsung di masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung memiliki 6 (enam) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan Pagu Indikatif APBD sebesar Rp.20.266.183.940,- (dua puluh miliar dua ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

5.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renja Bakesbangpol) Kota Bandung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Renja Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2024 berpedoman kepada Rencana Strategis Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2024-2026.
2. Renja Bakesbangpol Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2024.
3. Nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan dalam Renja Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2024 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah c.q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Selanjutnya Renja Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2024 akan diinput dalam SIPD sesuai Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan besaran anggaran sesuai Surat Edaran Walikota atau Sekretaris Daerah Kota Bandung yang mencantumkan pagu anggaran.
5. Menyikapi Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2024 maka akan dilakukan Perubahan Renja Bakesbangpol Kota Bandung tahun 2024 seperlunya.

5.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mengoptimalkan seluruh Anggaran dan mencapai hasil *(outcome)* program maupun keluaran *(output)* kegiatan maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung akan lebih meningkatkan koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk "Meningkatnya Kualitas Kesatuan Bangsa dan Demokrasi" di Kota Bandung.

Tema seluruh sub kegiatan akan disesuaikan dengan isu yang hangat baik isu lokal maupun nasional, karena isu mengenai kesatuan bangsa dan politik sangat dinamis.

Demikian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung ini disusun, semoga dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi kita semua.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDUNG,

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Drs. H. BAMBANG SUKARDI, M. Si.
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 19671005 198903 1 008